

RENCANA STRATEGI TAHUN 2025-2029



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan Tahunan bagi unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut adalah bahan setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategi (Renstra) sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Klungkung sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sebelumnya disebut dengan Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, merupakan salah satu OPD di Kab. Klungkung wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka memberikan arah berbagai program kegiatan yang telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan Kepada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana. Terkait dengan masa Bakti Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2025-2029, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu dari Tahun 2025-2029. Kami menyadari bahwa renstra tidak dapat memenuhi keinginan

Kami menyadari bahwa Renstra yang dibuat ini tidak sempurna, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya nanti kami mengharapkan saran dan masukan dari para *stakeholders* agar Rencana program dan rencana kegiatan dalam Renstra ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR ISI

Judul i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis DPMDPPKB. 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMDPPKB..... 7

2.2 Sumber Daya Pada DPMDPPKB 19

2.3 Kinerja Pelayanan DPMDPPKB..... 32

2.4 Permasalahan pelayanan DPMDPPKB..... 37

2.5 Isu-Isu Strategis DPMDPPKB 37

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 39

3.1 Tujuan Renstra DPMDPPKB..... 40

3.2 Telaahan Renstra kementrian /lembaga..... 41

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan 49

4.1 Program dan Kegiatan..... 49

BAB VIII _PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR
TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KLUNGKUNG NOMOR TAHUN TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka integrasi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, oleh karena hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah ikut mengalami perubahan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan .

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten klungkung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMDPPKB Kabupaten Klungkung dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, dan

strategi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan perangkat daerah. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan DPMDPPKB Kabupaten Klungkung. Renstra DPMDPPKB Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Terkait penyusunan Renstra SKPD peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang teruang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai salah satu OPD di lingkungan Kabupaten Klungkung menyusun dan menetapkan Renstra DPMDPPKB tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029 berpedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2009-2025.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;
- o. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- p. Perbup Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPMDPPKB Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dimaksud untuk memberikan landasan, arah dan kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

1. tersedianya arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah; dan
2. tersedianya target kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, rationable and time boundly*) sebagai tolok ukur capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi PD; sumber daya yang dimiliki oleh PD, kinerja pelayanan sampai saat ini, evaluasi capaian IKK lima tahun terakhiridentifikasi permasalahan,dan mengedintifikasi isu strategis

- c. BAB III TUJUAN ,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam periode lima tahun mendatang.

- d. BAB IV PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini rencana program dan kegiatan PD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.dan memuat indikator kinerja PD yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.

- e. BAB V PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPM DPPKB

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPM DPPKB

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan tugas di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan tugas di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tugas di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas tugas di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu KepalaDinas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu sekretaris menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, tatausaha, reformasi birokrasi, manajemen sumber daya aparatur serta penatalaksanaan hubungan masyarakat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengelolaan data/informasi publik pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada dinas pemberdayaan

masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat (humas) pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengelolaan manajemen sumber daya aparatur pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- g. Pelaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2 Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan

- pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kawasan Perdesaan Dan Kerjasama Desa.
- Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan melaksanakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama

desa;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kawasan Perdesaan Dan Kerjasama Desa;
 - c. Pengelolaan data/informasi di bidang Pemberdayaan Usaha Dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kawasan Perdesaan Dan Kerjasama Desa;
 - d. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kawasan Perdesaan Dan Kerjasama Desa;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kawasan Perdesaan Dan Kerjasama Desa; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Pemerintahan Desa
- Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, asset desa, dan penataan kelembagaan pemerintahan desa.

Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, aset desa, dan penataan kelembagaan pemerintahan desa;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, aset desa, dan penataan kelembagaan pemerintahan desa;
 - c. Pengelolaan data/informasi di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, aset desa, dan penataan kelembagaan pemerintahan desa;
 - d. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, aset desa, dan penataan kelembagaan pemerintahan desa;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, aset desa, dan penataan kelembagaan pemerintahan desa; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk Dan KB.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. Pengelolaan data/informasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. pengelolaan sistem informasi keluarga;
- e. pelaksanaan pelayanan KB Daerah;
- f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
- g. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- h. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten bidang pengendalian penduduk dan KB;

- i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketahanan remaha, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- d. pengelolaan data/informasi di bidang ketahanan dan

- kesejahteraan keluarga;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta di bidang pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga dan;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi DPMDPPKB

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan kawasan Perdesaan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

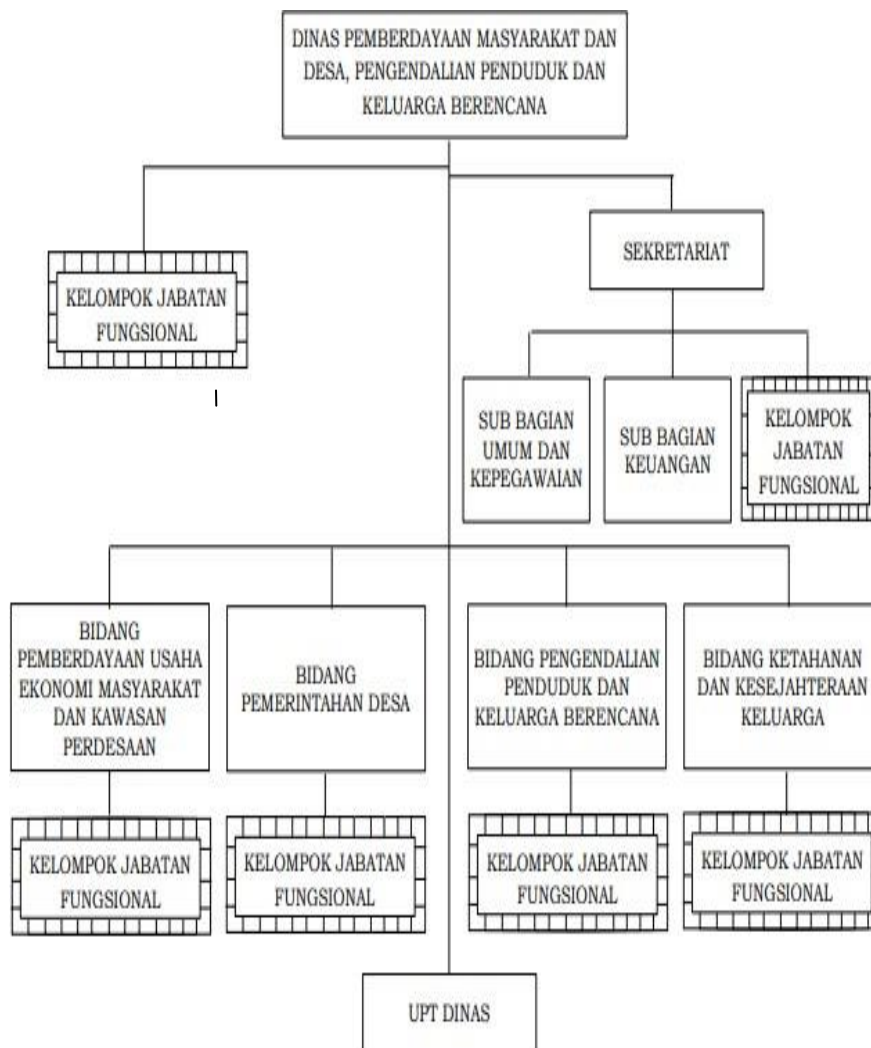
Berencana

a. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

7. Kelompok jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Pada DPMDPPKB

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2021 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2024

No	Usia	Jenis Kelamin			Golongan Ruang				S M P	S M A	Pendidikan			
		L	P	Jml	II	III	IV	Jml			Diploma /S1	S 2	S3	Jml
1	20-30	0	0	0			0	0						0
2	31-40	3	4	7	2	6		8		2	6			8
3	41-50	9	4	13	2	7	2	11		2	8	1		11
4	51-60	7	4	11	3	9		12		4	7	1		12
	Jumlah	19	12	31	7	23	2	31	0	8	22	2	0	31

Sumber : DPMDPPKB Kab. Klungkung, 2024

SDM DPMDPPKB berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun, namun ada 19 orang yang umurnya diatas 50 tahun.

Tabel 2.2

Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Eselon	Jumlah	Yang Ada	Belum Terisi
1	Eselon IIb	1	1	0
2	Eselon IIIa	1	0	1
3	Eselon IIIb	4	4	0
4	Eselon Iva	15	14	0

Sumber data : Laporan DSP DPMDPPKB per 31 Desember 2024

Dilihat dari jabatan struktural, dari 15 jabatan struktural terdapat 1 jabatan yang kosong sejak bulan Oktober 2024 yaitu jabatan sekretaris. Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Baperlitbang adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Perbandingan Jumlah Golongan yang ada di masing masing Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024

GOLONGAN / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG Pemerintahan Desa Dan Kelurahan		BIDANG Keluarga Berencana		BIDANG Ketahanan dan Keluarga Sejahtera		BIDANG Pemberdayaan Usaha Ekonomi Dan Kawasan Pedesaan		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a											0	0	0
II/b											0	0	0
II/c	1	1									1	1	2
II/d			1								1	0	1
III/a											0	0	0
III/b	4									1	4	1	5
III/c	2	1						2		1	3	3	6
III/d		1	1	2	1	1				2	2	6	8
IV/a			1			1					2	0	2
IV/b		1									0	1	1
IV/c	1										1	0	1
IV/d											0	0	0
IV/e											0	0	0

Honorier/kontrak		2	1	1		1		1	1	1	2	6	8
JUMLAH	8	6	4	3	1	3	2	2	1	5			

Sumber : DPMDPPKB Kab. Klungkung, 2024

2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbandingan Kebutuhan sarana prasarana yang ada /Rusak pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Minimum/Ideal	Kondisi Saat Ini		Belum Terpenuhi	Keterangan
			Baik	Rusak		
1	Gedung Kantor	3 unit	3		0	
2	Ruang rapat	2 ruangan	2		0	
3	Ruang kerja	5 ruangan	11		1	
4	Ruang Arsip	1 ruangan	1		0	
5	Jaringan listrik, telepon dan internet	2 jaringan	2		0	
6	Meja kerja	20 unit	20		0	
7	Kursi kerja	30 unit	30	0	0	
8	Komputer PC	25 unit	5	10	10	
9	Laptop/Notebook	15 unit	5	5	5	
10	AC	7 unit	3	4	3	
11	Printer biasa	9 unit	6	3	0	
12	Printer multi fungsi	8 unit		8	0	
13	Filling Cabinet	22 unit	17		5	
14	Rak Arsip	5 unit	0		5	

15	Mobil Pimpinan	1 unit	1		0	
16	Mobil Operasional	5 unit	5		0	
17	Sepeda Motor	61 unit	43	13	5	PLKB
18	UPS	7 unit	7		0	
19	Lemari Kayu	8 unit	7		1	
20	Mesin absensi elektronik	2 unit	2		0	
21	LCD Proyektor	1 unit	2		1	
22	LED TV	1 unit	1		0	
	Jumlah	236	227	23	46	

Sumber : DPMDPPKB Kab. Klungkung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat capaian pemenuhan sarana dan prasarana DPMDPPKB pada tahun 2024 adalah sebesar 85% dan diantaranya masih terdapat 9% sarana dan prasarana yang dimiliki dalam kondisi rusak. Sarpras yang belum memadai diantaranya kendaraan roda dua yang digunakan oleh PLKB belum sesuai kebutuhan minimum yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas. Sarana dan prasarana penting lainnya adalah ketersediaan PC/laptop. Komputer PC ataupun laptop untuk menunjang pelaksanaan kegiatan DPMDPPKB masih kurang ditengah perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Idealnya setiap orang pegawai mendapat komputer PC masing-masing.

2.2.3 Sumber Daya DPMDPPKB Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlunya adanya sumber daya diantaranya :

- a. Desa di Kabupaten Klungkung yaitu

NO	KECAMATAN	DESA
1	Klungkung	1. Satra
		2. Tojan
		3. Gelgel
		4. Kampung Gelgel
		5. Jumpai
		6. Tangkas
		7. Kamasan
		8. Akah
		9. Manduang
		10. Selat
		11. Tegak
		12. Selisihan
TOTAL		
2	Banjarangkan	1. Negari
		2. Takmung
		3. Banjarangkan
		4. Tusan
		5. Bakas
		6. Getakan
		7. Tihingan
		8. Aan
		9. Nyalian
		10. Bungbungan
		11. Timuhun
		12. Nyanglan
		13. Tohpati
TOTAL		

3	Dawan	1. Pakseball
		2. Sampalan Tengah
		3. Sampalan Klod
		4. Sulang
		5. Gunaksa
		6. Kusamba
		7. Kampung Kusamba
		8. Pesinggahan
		9. Dawan Klod
		10. Pikat
		11. Dawan Kaler
		12. Besan
TOTAL		
4	Nusa Penida	1. Sakti
		2. Batumadeg
		3. Klumpu
		4. Batukandik
		5. Sekartaji
		6. Tanglad
		7. Suana
		8. Batununggul
		9. Kutampi
		10. Ped
		11. Kampung Toyapakeh
		12. Lembongan
		13. Jungutbatu
		14. Pejukutan
		15. Kutampi Kaler
		16. Bunga Mekar

- b. Pembangunan Desa kurang dari 80 persen dapat dilihat pada data berikut :

**Data Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Tahun Anggaran 2024**

NO	NAMA DESA			
		ANGGARAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	REALISASI BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	%
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)
1	Sakti	2.925.693.003,93	2.511.671.340,00	86
2	Batumadeg	2.005.215.460,20	1.664.865.120,83	83
3	Klumpu	1.790.334.914,05	1.010.150.500,00	56
4	Batukandik	2.150.245.191,46	1.832.282.700,00	85
5	Sekartaji	2.428.031.391,60	1.758.618.000,00	72
6	Tanglad	1.736.351.349,67	1.538.358.432,31	89
7	Suana	1.658.845.118,01	1.588.926.437,79	96
8	Batununggul	1.901.720.616,00	1.603.448.893,00	84
9	Kutampi	2.028.790.945,04	1.826.419.317,11	90
10	Ped	2.772.963.123,18	2.396.814.428,70	86
11	Kampung Toyapakeh	824.008.442,00	302.838.720,00	37
12	Lembongan	2.406.223.008,85	1.990.400.200,00	83
13	Jungutbatu	2.092.434.243,00	1.979.540.500,00	95
14	Pejukutan			

		2.201.585.763,91	1.763.866.346,80	80
15	Kutampi Kaler	1.540.040.777,90	1.423.357.008,00	92
16	Bunga Mekar	2.206.510.867,52	1.621.660.849,00	73
17	Negari	1.357.430.915,00	1.183.206.413,00	87
18	Takmung	661.043.560,89	540.726.400,00	82
19	Banjarangkan	1.524.946.545,00	1.080.729.255,00	71
20	Tusan	1.357.757.840,00	710.617.261,00	52
21	Bakas	3.654.658.403,96	793.839.825,00	22
22	Getakan	967.372.277,65	798.753.131,00	83
23	Tihingan	2.382.817.134,71	2.176.511.680,00	91
24	Aan	1.996.943.069,00	1.243.467.100,00	62
25	Nyalian	5.516.475.468,00	4.951.954.250,00	90
26	Bungbungan	938.694.677,00	829.400.650,00	88
27	Timuhun	988.329.154,85	788.233.640,00	80
28	Nyanglan	843.280.332,00	795.800.650,00	94
29	Tohpati	1.802.464.884,00	1.231.668.100,00	68
30	Satra	557.146.866,00	454.507.862,00	82
31	Tojan	1.005.297.980,20	771.715.943,00	77
32	Gelgel	916.907.951,50	697.383.600,00	76
33	Kampung Gelgel	1.536.080.559,00	1.226.769.190,00	80
34	Jumpai	1.693.752.400,00	1.620.785.550,00	96
35	Tangkas	2.004.418.046,02	1.357.895.800,00	68
36	Kamasan	1.386.304.133,75	1.224.238.180,00	88
37	Akah	2.066.972.490,66	1.312.840.800,00	64

38	Manduang	1.569.481.982,20	1.373.229.839,00	87
39	Selat	2.101.183.588,46	1.582.708.539,00	75
40	Tegak	766.369.111,00	541.755.244,00	71
41	Selisihan	1.845.444.615,00	1.524.859.322,00	83
42	Paksebali	1.423.687.897,00	1.182.331.732,00	83
43	Sampalan Tengah	828.546.246,23	717.444.544,12	87
44	Sampalan Klod	968.441.163,20	890.659.140,00	92
45	Sulang	1.494.802.920,00	1.198.795.850,00	80
46	Gunaksa	2.147.993.900,46	1.900.204.608,00	88
47	Kusamba	737.858.392,21	654.509.404,57	89
48	Kampung Kusamba	1.907.111.610,16	1.635.796.640,00	86
49	Pesinggahan	948.618.534,88	834.010.050,00	88
50	Dawan Klod	1.159.379.581,25	1.093.538.260,00	94
51	Pikat	2.113.951.941,89	1.676.479.860,00	79
52	Dawan Kaler	745.253.200,00	687.395.439,00	92
53	Besan	1.300.654.889,30	1.194.638.825,00	92
Jumlah		89.886.868.478,75	71.292.621.370,23	4.254,90

c. BUMDes yang ada di Kabupaten Klungkung

Klasifikasi BUMDes sebagai berikut :

No	Klasifikasi BUMDes	Jumlah
1	maju	7
2	berkembang	17
3	Tumbuh	27
4	Dasar	0
	Jumlah	51

d. Unmetneed Kabupaten Klungkung

Unmetneed adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.

No	Uraian	Persen				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Unmetneed	4,56	20,7	16,1	9,2	8,5

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan Unmetneed disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang KB, kurangnya dukungan suami dan kurangnya akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi.

e. Data PUS Kabupaten Klungkung

PUS adalah Pasangan usia subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksi sudah berfungsi dengan baik).

No	Uraian					
		2020	2021	2022	2023	2024
1	pasangan Usia Subur (PUS)	34706	34973	28647	29767	31798

Dalam tabel diatas dapat kita lihat bahwa pasangan usia subur terus bertambah namun tidak disertai pertumbuhan pemakaian ALKON. Ini dikarenakan kurang mengertinya pasangan terhadap pengaturan fertilitas (Kesuburan), Perawatan kehamilan dan persalinan aman. Dalam hal ini diperlukannya penyampaian terhadap pasangan tersebut tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan.

f. Data MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

MKJP adalah Alat Kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang meliputi IUD, Implan, MOW dan MOP berikut ini data pengguna MKJP di kabupaten Klungkung.

No	Uraian					
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IUD	12175	12119	4318	5312	4388
2	MOV	851	918	955	1246	1011
3	MOP	146	146	51	33	45
4	IMPLAN	2301	2424	1548	1839	1770

Pergeseran pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang pada tahun 2020 sampai 2024 semakin meningkat.

a. Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Desa Dan Kerjasama

Terbatasnya daya kreatifitas masyarakat yang disebabkan pola pikir yang belum mandiri sehingga mempengaruhi kecepatan penerimaan akses terhadap peluang–peluang sumber ekonomi

2.3 Kinerja Pelayanan DPMDPPKB

Indikator Pelayanan Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya:

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan.

Indikator kinerja kunci (IKK) sebagai berikut :

No	Indikator	Realisasi						2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	3.962	3.962	3.962	3.962	3.967	3.967	3.967
2	jumlah lembaga desa yang ditata sesuai standar	691	691	691	691	692	692	692

3	jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	0	0	0	5 sistem	5 sistem	5 sistem	5 sistem
4	jumlah desa mandiri	0	22	27	36	48	48	48
5	jumlah desa maju	0	26	22	15	5	5	5
6	jumlah desa berkembang	0	5	4	2	0	0	0
7	jumlah desa tertinggal	0	0	0	0	0	0	0
8	jumlah desa sangat tertinggal	0	0	0	0	0	0	0
9	jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) maju	0	0	0	0	0	7	7
10	jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) berkembang	0	0	0	0	0	15	15
11	jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) pemula	0	0	0	0	0	7	7
12	jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) perintis	0	0	0	0	0	3	3

Indikator kineja utama (IKU) sebagai berikut :

No	Indikator	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Desa Mandiri	n/a	41	50	67	90	90

	(%)						
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	56,86	66,65

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan KB selama 5 tahun ini sudah terealisasi dengan baik. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMDPPKB

N o	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian pada tahun					rata-rata Pertumbuha n	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 20	2021 21	2022 22	2023 23	2024 24	anggaran	Real isasi
	10.427.9 11.803	11.143.4 38.788	11.622.8 52.258	13.850.6 73.843	13.782.3 17.734	9.254.6 78.516	9.825.4 84.538	10.388.8 24.078	12.451.4 47.826	121247 23275	8 8,7 5	8 8,1 7	8 9,3 8	89 ,9	81, 97	1,2	1,08

2.4 Permasalahan Pelayanan DPMDPPKB

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPMDPPKB kabupaten Klungkung tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat kerjasama antar desa
3. Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur untuk melaksanakan program KB

2.5 Isu-Isu Strategis DPMDPPKB

Tabel 2.1

Isu strategis DPMDPPKB

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan dampaknya terhadap lingkungan.		membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,	Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya, termasuk akses terhadap	Masih lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat kerjasama antar desa			dan pemberantasan	lingkungan yang bersih dan sehat,	masih rendahnya pemanfaatan potensi desa dan kerjasama desa
	Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur untuk melaksanakan program KB					rendahnya PUS ber KB aktif

2.6 Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Adapun potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yaitu : locus percepatan penurunan stunting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

N o	Indikator	Satua n	Target Tahun						Keteranga n
			2025	2026	2027	2028	202 9	2030	
1	persentaseKelompok sasaran pendampingan keluarga 1000 HPK	perse n	77.7 3	83.3 0	88.8 6	94.4 3	100	100	
2	persentase calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	perse n	100	100	100	100	100	100	
3	persentase Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	perse n	50.1 3	55.1 0	60.0 6	65.0 3	70	74.9 7	

BAB III

TUJUAN, SASASRAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DPMDPPKB

Table 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMDPPKB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Meningkatkan kemandirian desa - Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemandirian desa dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		Indeks Desa (Indeks)	3,5	9,4	18,8	28,2	37,6	47	
			Umur Harapan Hidup (Tahun)	75,16	75,42	75,68	75,94	76,2	76,5	
		Meningkatnya kualitas kelembagaan desa dan perekonomian masyarakat desa	Persentase lembaga perekonomian desa yang aktif (%)	71	73	75	80	83	85	
			Persentase desa dengan capaian target pembangunan >80% (%)	75	78	79	80	85	90	
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	66,67	67,1	68	68,9	69,7	70,6	

3.2 Sasaran Renstra DPMDPPKB

Adapun sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan desa dan perekonomian masyarakat desa dengan indicator :
 - a. Persentase lembaga perekonomian desa yang aktif (%)
 - b. Persentase desa dengan capaian target pembangunan >80% (%)
2. Terwujudnya Keluarga Berkualitas dengan indicator : Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga

Visi, Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa jabatan Bupati dan wakil Bupati .Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Pernyataan Visi pemerintah Kabupaten Klungkung pada RPJMD tahun 2025-2029 adalah:

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Menuju Klungkung Mahotama (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur)

Misi adalah:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.

4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara konprehensif dan terintegrasi.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata dan meningkatkan promosi pariwisata dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
14. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan secara konprehensif.
15. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi wilayah dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
16. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya untuk memperkuat perekonomian daerah.

17. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik.
18. Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
19. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
20. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan Misi Ke 3 Dan Misi Ke 16:

Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatnya keberdayaan masyarakat mandiri baik dari tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa maupun dari pemerintahan desa.

A. Renstra BKKBN adalah :

1. **Visi** : Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang Menuju Indonesia Emas 2045”
2. **Misi** :
 - a. Keluarga berkualitas merupakan keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia yang diupayakan melalui pendekatan siklus hidup.
 - b. Penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian angka kelahiran total (TFR) yang dijaga pada angka 2.1.
 - c. Pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Modal Manusia Indonesia.

3. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2025-2029 yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2025-2029 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

dapat mencapai 2,12 pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 2,10 pada tahun 2029.

- b. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 61,6 (skala 1-100) pada tahun 2025 serta ditargetkan menjadi 64,0 (skala 1-100) pada tahun 2029.
- c. pada tahun 2025 serta ditargetkan menjadi 64,0 (skala 1-100) pada tahun 2029. Menurunnya Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan dari 30 persen tahun pada tahun 2025 dan menjadi 25 persen pada tahun 2029.
- d. Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan 15-19 tahun) dari sebesar 19.4 kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun pada tahun 2025 dan menjadi 17.8 kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun pada tahun 2029.
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dari sebesar 63 (skala 1-100) pada tahun 2025 dan menjadi 71 (skala 1-100) pada tahun 2029.
- f. Meningkatnya Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods) 84,5 persen pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 87,1 persen pada tahun 2029.
- g. Menurunnya Kehamilan Tidak Diinginkan pada PUS dari 11.26 persen pada tahun 2025 dan menjadi 10 persen pada tahun 2029.
- h. Meningkatnya kualitas informasi program berbasis elektronik (Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) dari 3.5 (skala 1-5) pada tahun 2025 dan menjadi 4.25 (Skala 1-5) pada tahun 2029.
- i. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi BKKBN dari sebesar 78 (skala 1-100) pada tahun 2025 dan menjadi 81 (skala 1-100) pada tahun 2029.

i. Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan sub-bidang Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dalam lima tahun ke depan adalah:

- 1.** Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia

(SDM) berkualitas, melalui strategi:

1. Peningkatan kualitas remaja termasuk pra remaja dalam pengetahuan kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga, serta pencegahan stunting bagi remaja pra nikah.
 2. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun)
 3. Pendampingan Dan Pembinaan Kemandirian Ekonomi Keluarga
 4. Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pendampingan Keluarga
 5. Pendampingan Dan Pembinaan Sasaran Keluarga Rentan.
2. Menerapkan sinergisitas kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif, melalui strategi:
1. Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di seluruh tingkatan wilayah.
 2. Penguatan sinergisitas perencanaan dan konvergensi pelaksanaan
 3. pengendalian penduduk antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 4. Penyediaan dan pemanfaatan parameter pengendalian kependudukan.
 5. Peningkatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, melalui strategi:
1. Peningkatan akses dan kualitas fasyankes, jejaring serta tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KBKR.
 2. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 3. Peningkatan promosi KBKR berdasarkan siklus hidup.
 4. Peningkatan jejaring kemitraan program KBKR
 5. Memperkuat Advokasi dan Komunikasi Perubahan Perilaku,
 6. Memperkuat Advokasi dan Komunikasi Perubahan Perilaku,
 7. Memperkuat Kolaborasi Mitra Kerja

a. **Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal**

Visi

- Mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

b. **Misi**

Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2025-2029:

- 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia desa.
- 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.
- 3. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas desa.
- 4. Membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik dan partisipatif.
- 5. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
- 6. Mengembangkan potensi unggulan desa dan kawasan perdesaan.
- 7. Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan desa.

3.4 Strategi DPMDPPKB dalam mencapai Tujuan
Rencana tindakan yang komperhensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan . adapaun tahapan tersebut yaitu

Tabel 3.4
Penahapan Renstra DPMDPPKB

Tahap I 2026	Tahap li 2027	Tahap lii 2028	Tahap Iv 2029	Tahap V 2030
Fasilitasi Terhadap Kelembagaan Desa Dan Lembaga Perekonomian Desa	Fasilitasi Terhadap Kelembagaan Desa Dan Lembaga Perekonomian Desa	Fasilitasi Terhadap Kelembagaan Desa Dan Lembaga Perekonomian Desa	Fasilitasi Terhadap Kelembagaan Desa Dan Lembaga Perekonomian Desa	Fasilitasi Terhadap Kelembagaan Desa Dan Lembaga Perekonomian Desa
Pelaksanaan Kie Dan Pendampingan Pada Aseptor Kb	Pelaksanaan Kie Dan Pendampingan Pada Aseptor Kb	Pelaksanaan Kie Dan Pendampingan Pada Aseptor Kb	Pelaksanaan Kie Dan Pendampingan Pada Aseptor Kb	Pelaksanaan Kie Dan Pendampingan Pada Aseptor Kb

3.5 **Arah Kebijakan**

Suatu rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah dan arah RPJMD serta selarah dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran perangkat. Adapun arah kebijakan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu :

N O	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RESTRA PD	KETERANGAN
1	pendampingan /monitoring/ evaluasi lembaga perekonomian desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat :1. melakukan pendampingan terhadap lembaga perekonomian desa. 2. fasilitasi terhadap lembaga perekomoan desa.	Penguatan perekonomian masyarakat lokal dengan mengembangkan potensi dan sumber daya yang tersedia	mengoptimalkan perkembangan usaha pekonomian desa	
2	Pelayanan kontrasepsi di faskes : 1. Memastikan ketersediaan berbagai jenis alat kontrasepsi yang aman dan efektif di fasilitas kesehatan,2. melakukan MOU dengan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB	Pemerataan akses kesehatan dengan fokus pada wilayah terpencil seperti Nusa Penida.	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan	
3	pendampingan dan konseling bagi pasangan usia subur : 1.Memberikan konseling kepada pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi		mengoptimalkan KIE pada pasangan usia subur melalui PKB/PLKB	

	yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. 2. Memberikan pendampingan kepada akseptor KB untuk memastikan mereka menggunakan alat kontrasepsi dengan benar dan mengatasi masalah yang mungkin timbul.			
--	--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yaitu :

Tabel 4.2
Program,Kegiatan dan sub kegiatan renstra DPMDPPKB

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARA N	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERAN GAN
- Meningka tnya kemandiri an desa - Meningka tnya kualitas kesehata n masyarak at	Meningka tnya kemandiri an desa dan meningka tnya kualitas kesehata n masyarak at	Meningka tnya kualitas kelembag aan desa dan perekono mian masyarak at desa			Indeks Desa		
					Umur Harapan Hidup		

					Persentase lembaga perekonomian desa yang aktif (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase desa dengan capaian target pembangunan >80% (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu	Persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	

					Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD	
					IP ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penataan desa		persentase fasilitasi kerjasama desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Persentase desa bekerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	

					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		persentase fasilitasi tata kelola desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	

					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan		persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

				Persentase evaluasi lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas			Indeks Pembangunan Keluarga		
			Terkendalnya pertumbuhan jumlah penduduk		angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				persentase jumlah peserta kb aktif (persen)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	

					yang Tersedianya		
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				persentase PUS yang memperoleh KIE (persen)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai	

					(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	

					(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	

					(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
				persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan (persen)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program	

					Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				persentase alkon yang terdistribusikan ke faskes	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				persentase IMP dalam melaksanakan program bangga kencana	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Meningkatn		persentase keluarga	PROGRAM	

			ya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				persentase poktan yang melaksanakan penyuluhan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana	Pengadaan Sarana	

					Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	

					Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Pendampingan keluarga 1000 HPK	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	

					(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

4.2 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu.

Tabel 4.3
Program, Kegiatan, sub kegiatan indikator dan pagu renstra DPMDPPKB

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				14.662.507.694,00		14.636.343.172,00		14.783.830.982,00		14.836.810.982,00		14.827.660.983,00
2.13.01 - PROGRAM				10.629.513.152,00		10.203.850.970,00		10.200.870.970,00		10.203.850.970,00		10.203.850.970,00

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A												
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69	70	10.629.513 .152,00	71	10.203.850 .970,00	71.69	10.200.870 .970,00	72	10.203.850 .970,00	73	10.203.850 .970,00
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.984.300, 00		13.290.000 ,00		10.310.000 ,00		13.290.000 ,00		13.290.000 ,00
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	9.984.300, 00	9	13.290.000 ,00	9	10.310.000 ,00	9	13.290.000 ,00	9	13.290.000 ,00
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	23		23		23		23		23	
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.795.400, 00		5.250.000, 00		5.250.000, 00		5.250.000, 00		5.250.000, 00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	6.795.400, 00	9	5.250.000, 00	9	5.250.000, 00	9	5.250.000, 00	9	5.250.000, 00
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja				3.188.900, 00		8.040.000, 00		5.060.000, 00		8.040.000, 00		8.040.000, 00

Perangkat Daerah												
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	23	3.188.900,00	23	8.040.000,00	23	5.060.000,00	23	8.040.000,00	23	8.040.000,00
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.100.990.272,00		9.670.868.160,00		9.670.868.160,00		9.670.868.160,00		9.670.868.160,00
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.095.372.872,00		9.662.218.160,00		9.662.218.160,00		9.662.218.160,00		9.662.218.160,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	10.095.372.872,00	30	9.662.218.160,00	30	9.662.218.160,00	30	9.662.218.160,00	30	9.662.218.160,00
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.617.400,00		8.650.000,00		8.650.000,00		8.650.000,00		8.650.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	5.617.400,00	12	8.650.000,00	12	8.650.000,00	12	8.650.000,00	12	8.650.000,00
2.13.01.2.05 - Administrasi				2.083.900,00		87.426.200,00		87.426.200,00		87.426.200,00		87.426.200,00

Kepegawaian Perangkat Daerah												
IP ASN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	2.083.900,00	2	87.426.200,00	2	87.426.200,00	2	87.426.200,00	2	87.426.200,00
2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.083.900,00		87.426.200,00		87.426.200,00		87.426.200,00		87.426.200,00
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	2.083.900,00	2	87.426.200,00	2	87.426.200,00	2	87.426.200,00	2	87.426.200,00
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				36.671.300,00		7.440.000,00		7.440.000,00		7.440.000,00		7.440.000,00
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.586.500,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.586.500,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan				30.566.000,00		-		-		-		-

Perlengkapan Kantor												
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	30.566.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				982.800,00		990.000,00		990.000,00		990.000,00		990.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	982.800,00	1	990.000,00	1	990.000,00	1	990.000,00	1	990.000,00
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.536.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	3.536.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	-	12	1.250.000,00	12	1.250.000,00	12	1.250.000,00	12	1.250.000,00
2.13.01.2.08 -				327.109.24		265.887.31		265.887.31		265.887.31		265.887.31

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.890.000,00		64.890.000,00		64.890.000,00		64.890.000,00		64.890.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	64.890.000,00	1	64.890.000,00	1	64.890.000,00	1	64.890.000,00	1	64.890.000,00
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				262.219.240,00		200.997.310,00		200.997.310,00		200.997.310,00		200.997.310,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	262.219.240,00	1	200.997.310,00	1	200.997.310,00	1	200.997.310,00	1	200.997.310,00
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152.674.140,00		158.939.300,00		158.939.300,00		158.939.300,00		158.939.300,00
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,				123.134.140,00		149.399.300,00		149.399.300,00		149.399.300,00		149.399.300,00

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	24	123.134.140,00	24	149.399.300,00	24	149.399.300,00	24	149.399.300,00	24	149.399.300,00
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.540.000,00		9.540.000,00		9.540.000,00		9.540.000,00		9.540.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	13	29.540.000,00	13	9.540.000,00	13	9.540.000,00	13	9.540.000,00	13	9.540.000,00
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				1.900.600,00		14.084.000,00		14.084.000,00		14.084.000,00		14.084.000,00
Meningkatnya kualitas penataan desa	persentase fasilitasi kerjasama desa	0	50	1.900.600,00	55	14.084.000,00	60	14.084.000,00	65	14.084.000,00	70	14.084.000,00
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				1.900.600,00		14.084.000,00		14.084.000,00		14.084.000,00		14.084.000,00
Persentase desa	Jumlah Dokumen	1	1	1.900.600,	1	14.084.000	1	14.084.000	1	14.084.000	1	14.084.000

bekerjasama	Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			00		,00		,00		,00		,00
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1	1	1.900.600,00	1	14.084.000,00	1	14.084.000,00	1	14.084.000,00	1	14.084.000,00
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				2.904.647.806,00		3.367.942.926,00		3.518.410.736,00		3.568.410.736,00		3.559.260.737,00
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	persentase fasilitasi tata kelola desa	100	100	2.904.647.806,00	100	3.367.942.926,00	100	3.518.410.736,00	100	3.568.410.736,00	100	3.559.260.737,00
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2.904.647.806,00		3.367.942.926,00		3.518.410.736,00		3.568.410.736,00		3.559.260.737,00
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				7.356.300,00		12.745.650,00		12.745.650,00		12.745.650,00		12.745.650,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	1	7.356.300,00	1	12.745.650,00	1	12.745.650,00	1	12.745.650,00	1	12.745.650,00
2.13.04.2.01.0004 -				965.728.57		981.620.75		981.620.75		981.620.75		981.620.75

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	1	965.728.57 0,00	1	981.620.75 0,00	1	981.620.75 0,00	1	981.620.75 0,00	1	981.620.75 0,00
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				8.303.200, 00		7.580.000, 00		7.580.000, 00		7.580.000, 00		7.580.000, 00
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	106	106	8.303.200, 00	106	7.580.000, 00	106	7.580.000, 00	106	7.580.000, 00	106	7.580.000, 00
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1.619.518. 600,00		1.663.139. 500,00		1.663.139. 500,00		1.713.139. 500,00		1.713.139. 500,00
Terselenggarakann ya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	1	1.619.518. 600,00	1	1.663.139. 500,00	1	1.663.139. 500,00	1	1.713.139. 500,00	1	1.713.139. 500,00
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan				5.384.000, 00		7.650.000, 00		7.650.000, 00		7.650.000, 00		7.650.000, 00

Penegasan Batas Desa												
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1	1	5.384.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				298.357.136,00		695.207.026,00		845.674.836,00		845.674.836,00		836.524.837,00
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	1	298.357.136,00	1	695.207.026,00	1	845.674.836,00	1	845.674.836,00	1	836.524.837,00
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.126.446.136,00		1.050.465.276,00		1.050.465.276,00		1.050.465.276,00		1.050.465.276,00
meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam	persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	49	80	1.126.446.136,00	85	1.050.465.276,00	90	1.050.465.276,00	95	1.050.465.276,00	100	1.050.465.276,00

pembangunan												
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.126.446. 136,00		1.050.465. 276,00		1.050.465. 276,00		1.050.465. 276,00		1.050.465. 276,00
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat				472.685.67 6,00		369.393.27 6,00		369.393.27 6,00		369.393.27 6,00		369.393.27 6,00

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	472.685.676,00	1	369.393.276,00	1	369.393.276,00	1	369.393.276,00	1	369.393.276,00
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				44.781.000,00		38.322.000,00		38.322.000,00		38.322.000,00		38.322.000,00
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	1	1	44.781.000,00	1	38.322.000,00	1	38.322.000,00	1	38.322.000,00	1	38.322.000,00

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa											
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				608.979.46 0,00		642.750.00 0,00		642.750.00 0,00		642.750.00 0,00		642.750.00 0,00
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	608.979.46 0,00	1	642.750.00 0,00	1	642.750.00 0,00	1	642.750.00 0,00	1	642.750.00 0,00
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				608.205.71 6,00		3.054.958. 940,00		3.054.958. 940,00		3.254.125. 984,00		3.254.125. 984,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				6.229.400, 00		5.856.740, 00		5.856.740, 00		14.395.000 ,00		14.395.000 ,00

Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	38	11.90	31.229.400	11.50	30.856.740	10	30.856.740	9.50	39.395.000	9.20	39.395.000
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				31.229.400		30.856.740		30.856.740		39.395.000		39.395.000
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				4.878.000, 00		4.500.000, 00		4.500.000, 00		4.500.000, 00		4.500.000, 00
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	1	4.878.000, 00	1	4.500.000, 00	1	4.500.000, 00	1	4.500.000, 00	1	4.500.000, 00
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Terlaksananya	Jumlah Laporan	1	1		1		1		1		1	

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1.351.400,00		1.356.740,00		1.356.740,00		9.895.000,00		9.895.000,00
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	1	1.351.400,00	1	1.356.740,00	1	1.356.740,00	1	9.895.000,00	1	9.895.000,00

Penduduk dan KB)												
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				435.562.40 0		5.373.343. 000		5.373.343. 000		5.945.229. 352		5.945.229. 352
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	8.50	7.50	314.241.60 0	7	2.786.562. 000	6.50	2.786.562. 000	6	3.167.819. 568	5.50	3.167.819. 568
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				101.120.80 0,00		2.566.581. 000,00		2.566.581. 000,00		2.757.209. 784,00		2.757.209. 784,00
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai				101.800.00 0		101.800.00 0		101.800.00 0		101.800.00 0		101.800.00 0

Penyuluhan Bangga Kencana												
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	101.800.00 0	1	101.800.00 0	1	101.800.00 0	1	101.800.00 0	1	101.800.00 0
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				0		2.458.600. 000,00		2.458.600. 000,00		2.458.600. 000,00		2.458.600. 000,00
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	1	1	0	1	2.458.600. 000,00	1	2.458.600. 000,00	1	2.458.600. 000,00	1	2.458.600. 000,00

dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai				101.120.80 0,00		107.981.00 0,00		107.981.00 0,00		298.609.78 4,00		298.609.78 4,00

Kearifan Budaya Lokal												
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1	1	101.120.80 0,00	1	107.981.00 0,00	1	107.981.00 0,00	1	298.609.78 4,00	1	298.609.78 4,00
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000

2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				12.456.000 ,00		-		-		-		-
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				3.978.000, 00		3.978.000, 00		3.978.000, 00		3.978.000, 00		3.978.000, 00
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh	1	1	3.978.000, 00	1	3.978.000, 00	1	3.978.000, 00	1	3.978.000, 00	1	3.978.000, 00

	PKB/PLKB											
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				8.478.000, 00		8.478.000, 00		8.478.000, 00		8.478.000, 00		8.478.000, 00
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu	1	1	8.478.000, 00	1	-	1	-	1	-	1	-

h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				314.775.00 0		414.775.00 0		414.775.00 0		414.775.00 0		414.775.00 0
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	60.000.000	1	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000
2.14.03.2.03.0003 -				219375000		219375000		219375000		219375000		219375000

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)												
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	202	202	219375000	202	219375000	202	219375000	202	219375000	202	219375000
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0		100.000.00 0		100.000.00 0		100.000.00 0		100.000.00 0
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	0	0	1	100.000.00 0	1	100.000.00 0	1	100.000.00 0	1	100.000.00 0
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				35400000		35400000		35400000		35400000		35400000
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga	1	1	35400000	1	35400000	1	35400000	1	35400000	1	35400000

Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	5	5	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000

Kampung Keluarga Berkualitas	Kependudukan, dan Keluarga Berencana)											
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				488.399.51 6,00		482.521.20 0,00		482.521.20 0,00		482.521.20 0,00		482.521.20 0,00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	80	82	488.399.51 6,00	83	482.521.20 0,00	84	482.521.20 0,00	85	482.521.20 0,00	86	482.521.20 0,00
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan				488.399.51 6,00		482.521.20 0,00		482.521.20 0,00		482.521.20 0,00		482.521.20 0,00

Keluarga												
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				28.035.600 ,00		32.610.400 ,00		32.610.400 ,00		32.610.400 ,00		32.610.400 ,00
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	28.035.600 ,00	1	32.610.400 ,00	1	32.610.400 ,00	1	32.610.400 ,00	1	32.610.400 ,00
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha				0		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000

Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25	10	0	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				188.339.86 8,00		188.872.46 8,00		188.872.46 8,00		188.872.46 8,00		188.872.46 8,00
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	20	25	188.339.86 8,00	27	188.872.46 8,00	30	188.872.46 8,00	35	188.872.46 8,00	40	188.872.46 8,00
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan				7.170.000, 00		7.800.000, 00		7.800.000, 00		7.800.000, 00		7.800.000, 00

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	1	7.170.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia				264.854.048,00		253.238.332,00		253.238.332,00		253.238.332,00		253.238.332,00

(BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)												
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	225	225	264.854.04 8,00	225	253.238.33 2,00	225	253.238.33 2,00	225	253.238.33 2,00	225	253.238.33 2,00
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1.049.400. 000		1.049.400. 000		1.049.400. 000		1.049.400. 000		1.049.400. 000

dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	477	477	1.049.400.000	477	1.049.400.000	477	1.049.400.000	477	1.049.400.000	477	1.049.400.000
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	524	524	0	524	0	524	0	524	0	524	0

4.3 Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Proritas Pembangunan Daerah

Table 4.4

Sub Kegiatan yang mendukung program proritas Pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Stunting 0% Tahun 2029	prevalensi stunting	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Yaitu :

Tabel 4.5
Indikator kinerja utama (IKU)

N O	INDIKATO R	SATU AN	TARGET TAHUN						KETERANG AN
			202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	

	Persentase desa dengan capaian target pembangunan >80%	74	75	78	79	80	85	90	
	Persentase lembaga perekonomian desa yang aktif	70	71	73	75	80	83	85	
	Indek Pembangunan Keluarga (I bangga)	66	66,6 7	67, 1	68	68, 9	69, 7	70, 6	

4.5 Target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui IKD dan IKK

Tabel 4.6
Indikator kinerja Daerah

N O	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Orang	32798	33798	34798	35798	36798	37798	
2	jumlah desa mandiri	Desa	5	15	20	25	30	35	
3	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	64	64.7	64.8	64.9	64.10	64.11	
4	Angka ASFR (kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	12	11.9	11.5	10	9.5	9.2	
5	jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	3972	3977	3982	2987	3992	3997	

6	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (%) (mCPR)	%	68.1 6	70.5 8	72.8 6	75.0 2	77.0 6	78.9 9	
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	14	16	17	18	19	20	
8	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	66.6 7	66.7 0	67.1	68	68.9	70.6	
9	Peserta KB Aktif	Orang	223 55	238 55	253 55	268 55	283 55	298 55	
10	persentaseKompok sasaran pendampingan keluarga 1000 HPK	%	72.1 6	77.7 3	83.3 0	88.8 6	94.4 3	100	
11	jumlah lembaga desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	694	696	698	700	701	703	
12	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.28	2.16	2.14	2.14	2.14	2.14	
13	persentase Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	%	50.1 3	55.1 0	60.0 6	65.0 3	70	74.9 7	
14	persentase calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	88.5 5	88.5 7	88.6 0	88.6 2	88.6 4	88.6 7	
16	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	86.5	86.8	87	87.1	87.2	87.5	

1 7	jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Sistem	6	7	7	7	7	7	
--------	--	--------	---	---	---	---	---	---	--

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	persentase Kelompok sasaran pendampingan keluarga 1000 HPK	persen	77.73	83.30	88.86	94.43	100	100	
2	persentase calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	persen	100	100	100	100	100	100	
3	persentase Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	persen	50.13	55.10	60.06	65.03	70	74.97	
4	Persentase pengentasan desa tertinggal	persen	0	0	0	0	0	0	
5	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	8	7,5	7	6,5	6	6,5	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai Uraian akhir pada bab penutup Renstra DPMDPPKB Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 ini, disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra DPMDPPKB ini selanjutnya akan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPMDPPKB sampai tahun 2026.
2. Dengan ditetapkannya Renstra DPMDPPKB tahun 2025-2029 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang terkait dengan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dijadikan acuan dan arahan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.
3. Renstra DPMDPPKB tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BUPATI KLUNGKUNG, ✱

I MADE SATRIA